

24

[illegible]

PEPALA KANTOR WILAYAH DEPAKTELINGGIPURBOWALAN..... REGIONAL PROPINSI JAWA BARAT

[illegible]

1. Undang-Undang Nomor 111, 1968
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 31 November 1982;
 - b. Nomor 0174/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
 - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
 - f. Nomor 0363/O/1984 tanggal 20 Juli 1984;
 - g. Nomor 0364/O/1984 tanggal 30 Juli 1984;
 - h. Nomor 223/MPK/AM/1993 tanggal 29 Desember 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 013/C/Kep/L, 1983 tanggal 23 Februari 1983;
 - b. Nomor 019/C/Kep/L, 1983 tanggal 23 Februari 1983;
 - c. Nomor 020/C/Kep/L, 1983 tanggal 23 Februari 1983;

1. Surat Edaran Dirjen Diklat dan Depdikbud Nomor 6118/CT/1986 tanggal 26 April 1986
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor. 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 22 September 1995

1. a) Kelembagaan dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung
 b) Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001
 c) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Dinas Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000
 d) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Dinas Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001
 e) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Dinas Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002
 f) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Dinas Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2003
 g) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Dinas Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004
 h) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Dinas Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005
 i) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Dinas Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006
 j) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Dinas Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007
 k) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Dinas Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008
 l) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Dinas Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009
 m) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Dinas Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010
 n) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Dinas Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011
 o) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Dinas Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012
 p) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Dinas Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013
 q) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Dinas Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014
 r) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Dinas Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015
 s) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Dinas Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016
 t) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Dinas Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017
 u) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Dinas Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018
 v) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Dinas Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019
 w) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Dinas Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020
 x) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Dinas Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021
 y) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Dinas Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022
 z) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Dinas Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023

Perihal:

Akte Rupa - Rupa Masyarakat
Penduduk Kabupaten Bandung

-7- tanggal 19 Mei 2000 tentang
Rupa Rupa Masyarakat

KEPUTUSAN

DITETAPKAN

1. Menetapkan Rupa Rupa Masyarakat Kabupaten Bandung untuk mendirikan SPP
Masyarakat Rupa Rupa Masyarakat Kabupaten Bandung mulai tahun
pelaksanaan 1999/2000
2. Penetapan ini berlaku pada masa berlakunya keputusan ini berlaku sepanjang
masa berlakunya keputusan yang ditetapkan dan wajib melakukan daftar ulang
(revisi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil
Depdiknas Propinsi Jawa Barat.
3. Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Prop.
Jawa Barat untuk melaksanakan dan peninjauan demi kelancaran
penyelenggaraan pendidikan tersebut.
4. Hal-hal yang nyata belum diatur dalam keputusan ini akan diatur
dalam keputusan tersendiri.
5. Keputusan ini berlaku pada masa berlakunya ditetapkan dengan catatan bahwa
apabila ditemukan hal yang bertentangan dengan keputusan ini akan
diadakan perbaikan berikutnya.

Ditetapkan di B. BANDUNG

Pada tanggal 19 Mei 2001

KEPALA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
WILAYAH DEPDIKNAS
KABUPATEN BANDUNG



Ditandatangani oleh Kepala Daerah

Dr. H. Achmad N. Ruli

Salinan :

1. Menteri Diknas di Jakarta,
2. Irjen Depdiknas di Jakarta,
3. Dirjen Diklat dan Depdiknas di Jakarta,
4. Direktur Dikmenum Dirjen Diklat dan Depdiknas di Jakarta,
5. Direktur Servis Dirjen Diklat dan Depdiknas di Jakarta,
6. Kantor Kanwil Depdiknas Prop. Jawa Barat
7. Ka. Bagran Kanwil Depdiknas Prop. Jawa Barat
8. Ka. Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Prop. Jawa Barat
9. Bupati Bandung
10. Kepala Depdiknas Kabupaten Bandung